

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KALIMANTAN FOREST YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN BIKAL KARYA LESTARI DI DESA SEKERAT, KALIMANTAN TIMUR**

**Novianti<sup>1</sup>, Sri Murlianti<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas partisipasi masyarakat dalam Program Kalimantan Forest (KalFor) yang dilaksanakan oleh Yayasan BIKAL Karya Lestari di Desa Sekerat, Kalimantan Timur. Program ini mengusung pendekatan partisipatif dan menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat lebih dominan pada aspek teknis, seperti pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil usaha, dibandingkan pada aspek pengambilan keputusan dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses FPIC tidak sepenuhnya dijalankan secara substansial, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk memberikan atau menolak persetujuan secara bebas. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam partisipasi, di mana kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan difabel kurang dilibatkan secara aktif. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam desain partisipasi agar lebih inklusif dan bermakna.*

**Kata Kunci:** FPIC, Inklusi Sosial, KalFor, Partisipasi, Pengelolaan Hutan

## ***Abstract***

*This study aims to analyze the quality of community participation in the Kalimantan Forest Program (KalFor) implemented by the BIKAL Karya Lestari Foundation in Sekerat Village, East Kalimantan. This program adopts a participatory approach and applies the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in community-based forest management. However, it was found that community participation was more focused on technical aspects, such as activity implementation and utilization of business results, rather than on decision-making and evaluation. The research method used was a descriptive*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [novianti@gmail.com](mailto:novianti@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that the FPIC process was not fully implemented substantively, as communities did not fully understand their right to freely give or withhold consent. Furthermore, there were inequalities in participation, with vulnerable groups such as women, the elderly, and people with disabilities being less actively involved. This study recommends improvements in the design of participation to make it more inclusive and meaningful.*

**Keywords:** *FPIC, Social Inclusion, KalFor, Participation, Forest Management*

## **Pendahuluan**

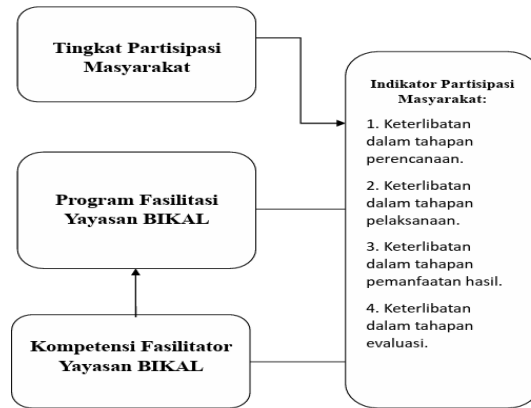
Pembangunan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek konservasi, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi sosial, terutama keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Dalam dua dekade terakhir, pendekatan partisipatif menjadi paradigma utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, karena dinilai mampu menciptakan rasa memiliki, mengurangi konflik, dan meningkatkan keberlanjutan program (Arnstein, 1969).

Di Indonesia, pendekatan partisipatif kerap diintegrasikan dalam program-program pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Salah satu prinsip yang digunakan adalah Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang cukup, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan (Colchester & Ferrari, 2007; Ruchyat, 2019). Prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program yang masuk ke wilayah masyarakat benar-benar dipahami, diterima, dan dijalankan secara sukarela oleh warga.

Program Kalimantan Forest (KalFor) yang dilaksanakan oleh Yayasan BIKAL Karya Lestari merupakan salah satu upaya pelestarian hutan yang mengusung pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan prinsip FPIC. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kawasan hutan melalui kegiatan ekonomi produktif seperti budidaya madu kelulut, pengolahan gula aren, dan ekowisata. Namun, dalam praktiknya, implementasi partisipasi sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan teknis, sementara keterlibatan dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih terbatas (Fikri & Pratama, 2022).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar bersifat substantif, bukan sekadar formalitas? Apakah prinsip FPIC dijalankan secara menyeluruh atau hanya menjadi jargon dalam dokumen program? Dan bagaimana kualitas partisipasi itu berdampak terhadap keberlanjutan program dan pemberdayaan masyarakat?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kualitas partisipasi masyarakat dalam Program KalFor di Desa Sekerat, serta menganalisis sejauh mana prinsip FPIC diimplementasikan dalam konteks sosial dan kelembagaan setempat.

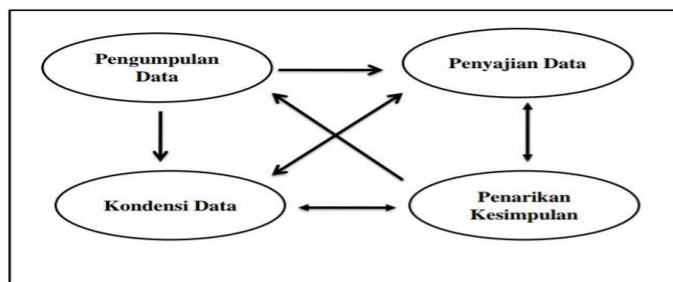


**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

Sumber: Olahan Penulis

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam Program KalFor di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali makna, pengalaman, dan realitas sosial dari pelaksanaan program partisipatif di tingkat lokal (Miles & Huberman, 1994).



**Gambar 2 Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif**

Sumber: *Qualitative data Analysis methods Sourcebook 2014 (Milles, Hubbrman dan Saldana)*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat penerima manfaat program, perangkat desa, pengurus kelompok seperti

Pokdarwis dan Sekurau Mandiri, serta fasilitator dari Yayasan BIKAL Karya Lestari.

- 2) Observasi partisipatif, dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan-kegiatan pelatihan, pertemuan kelompok, dan praktik usaha di lapangan.
- 3) Dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti berita acara musyawarah, rencana kerja kelompok, foto kegiatan, dan dokumen program dari yayasan.
- 4) Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data dari berbagai narasumber dan metode. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles & Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program KalFor oleh Yayasan BIKAL di Desa Sekerat menunjukkan dinamika partisipasi masyarakat yang kompleks dan berlapis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat lebih kuat pada tahapan pelaksanaan teknis, seperti pelatihan usaha dan kegiatan kelompok, dibandingkan pada tahap strategis seperti perencanaan dan evaluasi. Hal ini menandakan bahwa bentuk partisipasi yang terbangun bersifat instrumental, bukan transformasional (Arnstein, 1969).



**Gambar 3 Peta Wilayah Sekerat**

Pada gambar 3 di atas, menunjukkan peta administratif Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Wilayah ini merupakan desa pesisir dengan akses terbatas namun memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi, terutama di sektor kehutanan dan perairan. Kondisi geografis inilah yang menjadikan Desa Sekerat sebagai lokasi strategis untuk pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat oleh Yayasan BIKAL.

### *Partisipasi yang Terbatas pada Pelaksanaan*

Warga secara aktif terlibat dalam kegiatan pelatihan madu kelulut, produksi gula aren, dan pengelolaan ekowisata. Kegiatan tersebut bersifat

aplikatif dan memberi manfaat langsung, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, partisipasi ini lebih berorientasi pada keterlibatan fisik dan teknis, bukan pada pengambilan keputusan. Informasi tentang program umumnya diterima setelah program berjalan, bukan saat tahap perencanaan berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menyentuh level “kemitraan” atau “*delegated power*” dalam spektrum partisipasi (Arnstein, 1969), melainkan masih berada di tahap “informing” atau “consultation” secara terbatas.

### ***Implementasi FPIC yang Bersifat Prosedural***

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang menjadi pendekatan dasar dalam program, tidak sepenuhnya dijalankan secara substantif. Warga mengaku pernah diundang ke pertemuan sosialisasi, namun sebagian besar tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak program, mengusulkan alternatif, atau meminta penjelasan lebih lanjut. Hal ini bertentangan dengan esensi FPIC, yaitu memastikan bahwa masyarakat mengambil keputusan secara bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang cukup (Colchester & Ferrari, 2007).

Dalam praktiknya, FPIC lebih dijalankan sebagai syarat administratif ketimbang ruang diskusi kritis. Ini menciptakan jurang antara narasi kelembagaan dan realitas sosial di tingkat akar rumput, di mana masyarakat hanya mengikuti alur program tanpa daya negosiasi.



**Gambar 4 Struktur Organisasi Yayasan Bikal**

Sumber: Olahan Penulis

Gambar 4 di atas menampilkan struktur organisasi Yayasan BIKAL Karya Lestari. Struktur ini terdiri dari Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus, serta tim pelaksana lapangan yang mencakup direktur, manajer program, manajer keuangan, dan fasilitator. Tata kelola organisasi ini mendukung pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam program KalFor, khususnya dalam menjangkau komunitas akar rumput.

### ***Ketimpangan Partisipasi dan Eksklusi Sosial***

Penelitian juga menemukan adanya ketimpangan representasi. Kelompok perempuan lansia, penyandang disabilitas, serta warga di wilayah pinggiran tidak terlibat secara aktif dalam proses partisipatif. Informasi program banyak tersebar dari mulut ke mulut, tanpa strategi komunikasi yang inklusif. Hal ini menguatkan temuan bahwa mekanisme partisipasi belum sensitif terhadap keragaman sosial (Ruchyat, 2019). Partisipasi yang sempit ini berisiko memperkuat ketimpangan kekuasaan lokal, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya dan keputusan.

Menurut informan HM pada awalnya masyarakat yang berpartisipasi kebanyakan datang dari laki-laki usia produktif. Namun seiring berjalannya waktu setelah beberapa bulan kegiatan berjalan, mulai terlihat peningkatan dari keterlibatan ibu-ibu dan pemuda.

Informan MD pun mengatakan bahwa yang aktif memanglah kebanyakan laki-laki, terutama yang sudah biasa bekerja di kebun. Tapi saat ini ibu-ibu sudah mulai banyak yang ikut serta dalam pada program kegiatan yang diadakan, bahkan anak-anak juga sudah mulai tertarik. Menurutnya mungkin semua ini memang membutuhkan waktu agar seluruh masyarakat dapat aktif berpartisipasi.

Sama halnya yang disampaikan informan YT, bahwa pada awal program berjalan masyarakat cenderung pasif, ikut hanya karena diajak. Tapi sekarang masyarakat lebih proaktif, seperti mengusulkan model kandang lebah yang lebih cocok dengan kondisi kebun mereka. Meskipun belum semua kelompok menunjukkan keterlibatan yang setara. Masih terdapat perbedaan, seperti ibu-ibu yang terkadang masih sungkan untuk berbicara dalam forum besar.

### ***Kelembagaan dan Keberlanjutan Program***

Program berhasil membentuk kelompok usaha seperti Pokdarwis dan Sekurau Mandiri, yang menunjukkan antusiasme dan semangat inisiatif. Namun, aspek keberlanjutan masih lemah karena sebagian besar kegiatan berjalan dengan ketergantungan pada dukungan fasilitator dan belum memiliki strategi usaha jangka panjang. Masyarakat belum memiliki kapasitas kelembagaan yang mandiri untuk mengelola kegiatan setelah program berakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang kuat di awal belum diikuti dengan penguatan kelembagaan yang kokoh, sehingga berdampak pada lemahnya transisi program menuju fase berkelanjutan.

**Tabel 1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Program**

| <b>Tahapan Partisipasi</b> | <b>Tingkat Keterlibatan Masyarakat</b> | <b>Bukti/Kegiatan Terkait</b>                          | <b>Tahapan Partisipasi</b> |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Perencanaan                | Aktif                                  | Musdes, identifikasi potensi desa, diskusi perencanaan | Perencanaan                |

|                   |                |                                                               |                   |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pelaksanaan       | Aktif          | Pelatihan, demplot, pembentukan kelompok usaha                | Pelaksanaan       |
| Pemanfaatan hasil | Cukup aktif    | Produksi kripik, madu kelulut, promosi ekowisata              | Pemanfaatan hasil |
| Evaluasi          | Masih terbatas | Sebagian ikut forum konsultasi; belum semua kelompok terlibat | Evaluasi          |

Sumber: Olahan Penulis

Secara umum, keterlibatan masyarakat pada program Kalfor di Desa Sekerat tergolong bervariasi antar tahapan dan kelompok sosial. Seperti halnya pada tahap perencanaan, keterlibatan masih terbatas pada tokoh masyarakat dan perangkat desa. Pada tahap evaluasi, data menunjukkan bahwa tidak adanya forum evaluasi terbuka yang secara rutin melibatkan masyarakat. Evaluasi hanya dilakukan oleh pihak yayasan secara internal bersama perangkat desa. Hal ini membuat warga tidak mengetahui bagaimana hasil dari evaluasi yang dapat digunakan untuk perbaikan program.

Tingkat partisipasi yang cenderung tinggi terdapat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendekatan partisipasi belum terlaksana secara menyeluruh. Yayasan telah berhasil menggerakkan warga secara teknis, namun belum membangun keterlibatan warga secara penuh dalam pengambilan keputusan dan kontrol sosial terhadap program.

**Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Program KalFor Berdasarkan Tahapan Partisipasi**

| <b>Tahapan Partisipasi</b> | <b>Bentuk Kegiatan</b>                                | <b>Tanggal Pelaksanaan</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Persiapan                  | Identifikasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa  | 5–9 Mei 2023               |
|                            | Penyusunan agenda Musdes dan pemetaan sosial awal     | 8–10 Mei 2023              |
| Perencanaan                | Sosialisasi program dan Musyawarah Desa (Musdes)      | 10 Mei 2023                |
|                            | Identifikasi potensi desa dan pemetaan lokasi demplot | 15–17 Mei 2023             |
| Pelaksanaan                | Pembentukan LPHMD dan penyusunan Perdes               | 25 Mei – 2 Juni 2023       |
|                            | Pelatihan administrasi dan keamanan pangan            | 12–14 Juni 2023            |

|                   |                                                               |                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                   | Pelatihan produksi (keripik pisang, gula semut, madu kelulut) | 20–23 Juni 2023                |
|                   | Pengembangan demplot dan kegiatan ekowisata                   | Juli – Agustus 2023            |
| Pemanfaatan Hasil | Produksi dan distribusi produk lokal                          | September 2023 – Februari 2024 |
|                   | Pemanfaatan sarana ekowisata oleh masyarakat                  | Mulai Oktober 2023             |
| Evaluasi          | Forum Konsultasi Desa dan evaluasi kegiatan                   | Januari 2024                   |

Sumber: Olahan Penulis

Tabel diatas merupakan jadwal pelaksanaan program KalFor yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan fasilitator lapangan dan peninjauan dokumen kegiatan yang didokumentasikan Yayasan Bikal. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan secara terstruktur dengan melibatkan masyarakat sesuai tahapan yang sudah dirancang.

Program KalFor berjalan dari bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2024. Beberapa tahapan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan lembaga dilaksanakan di kuartal pertama. Sementara kegiatan ekonomi seperti produksi madu dan gula aren, serta pelatihan ekowisata, berlangsung intensif sejak pertengahan 2023.

## Kesimpulan dan Saran

### *Kesimpulan*

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program KalFor di Desa Sekerat masih bersifat terbatas dan belum menyentuh dimensi strategis. Masyarakat lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan teknis seperti pelatihan dan kegiatan ekonomi produktif, sementara keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi cenderung rendah. Partisipasi yang terjadi lebih bersifat prosedural dan instrumental, bukan partisipasi bermakna yang bersumber dari kesadaran dan kontrol sosial.

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjadi dasar pendekatan partisipatif belum dijalankan secara substansial. Masyarakat tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk memahami program secara kritis atau menyampaikan persetujuan dengan bebas dan berdasarkan informasi yang memadai. FPIC dijalankan sebagai tahapan sosialisasi semata, bukan sebagai proses dialog yang membebaskan.

Selain itu, partisipasi masyarakat masih mengalami ketimpangan, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan lansia, difabel, dan warga pinggiran yang tidak mendapatkan akses setara terhadap informasi dan ruang

partisipasi. Situasi ini mengindikasikan adanya eksklusi sosial dalam desain pelaksanaan program.

Ke depan, desain program berbasis partisipasi perlu memperhatikan dimensi inklusivitas, keberlanjutan kelembagaan, serta makna partisipasi itu sendiri. Pendekatan partisipatif tidak cukup hanya dengan melibatkan warga dalam kegiatan teknis, tetapi juga harus membuka ruang kritis bagi warga untuk berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

### ***Saran***

1. **Peningkatan Kapasitas Evaluasi Komunitas:**  
Pelatihan dan pendampingan khusus perlu diberikan kepada masyarakat terkait proses monitoring dan evaluasi partisipatif. Hal ini akan mendorong keterlibatan warga secara lebih menyeluruh dalam pengambilan keputusan jangka panjang.
2. **Penguatan Kelembagaan Lokal:**  
Yayasan BIKAL dan pemerintah desa disarankan untuk memperkuat kelembagaan lokal seperti LPHMD, Pokdarwis, dan kelompok usaha melalui pelatihan manajemen dan advokasi kebijakan agar mereka dapat berfungsi mandiri.
3. **Pemanfaatan Media Komunitas:**  
Penggunaan media informasi lokal seperti poster, radio desa, dan media sosial berbasis warga dapat dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi program dan meningkatkan partisipasi warga yang belum terlibat secara aktif.
4. **Replikasi Program Berbasis Potensi Lokal:**  
Model KalFor terbukti efektif dalam menggabungkan aspek konservasi dan ekonomi. Oleh karena itu, model ini dapat direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa, tentunya dengan adaptasi konteks sosial dan budaya lokal.
5. **Peningkatan Peran Kader Lokal:**  
Agen perubahan dan kader desa yang telah terbentuk perlu terus dilibatkan dan diperkuat agar dapat menjadi motor penggerak program yang berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

### **Daftar Pustaka**

- Arafah, E., & Winarso, H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota: Studi pada pendekatan kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(2), 145–157.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Cornell University.

- Djalal, F., & Supriadi, D. (2001). Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Davis, K. (1962). Human society. New York: Macmillan.
- Herdita Aries Permana, C., & Purnomo, D. (2021). Partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan: Tinjauan teoritik dan praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–59.
- Kadir. (2014). Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 87–95.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim. (2007). Pembangunan partisipatif dan demokrasi lokal: Menimbang ulang pendekatan bottom-up. *Jurnal Pemikiran Sosial*, 9(3), 67–78.
- Pawestri, C., & Muktiali, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program NUSP-2 di Kelurahan Kuningan Kota Semarang. *Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 109–121.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Siagian, S. P. (1985). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wastiti, R., Nugraheni, F. M., & Kusumawati, D. (2020). Peran fasilitator dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 33–42.
- Wicaksana, A. (2016). *Fasilitasi pembangunan desa berbasis masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.